

**METODE PNEYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
BERMASALAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA: TINJAUAN
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Jurusan Perbanka Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
JULIANA IDRIS
90500116032
ALAUDDIN
MAKASSAR

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juliana Idris
NIM : 90500116032
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 20 Juli 1998
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Kab. Pangkep
Judul : “Metode Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Bank Syariah di Indonesia; Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Juni 2020

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
JULIANA IDRIS
NIM: 90500116032



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong - Gowa . ■ 424835, Fax:424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah: Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia", yang disusun oleh JULIANA IDRIS, NIM 90500116032, Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus 2020 bertepatan dengan 12 Muharram 1442, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Samata-Gowa, 31 Agustus 2020
12 Muharram 1442

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. (.....)
Sekretaris : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak. (.....)
Penguji I : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. (.....)
Penguji II : Sumarlin, SE., M.Ak. (.....)
Pembimbing I : Ismawati, SE., M.Si. (.....)
Pembimbing II: Dr. Ilham Gani, SE., MM. (.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.

NID 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil „Aalamiin, segala puji syukur tiada hentinya penulis hanturkan kehadiran Allah SWT yang Maha pemberi petunjuk, anugerah, dan nikmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah di Indonesia: Tinjauan Fatwa Dewan Syariah-Nasional Majelis Ulama Indonesia”**.

Allahumma Sholli „ala Muhammad, penulis curahkan kehadiran junjungan umat, pemberi syafaat, penuntun jalan kebajikan, penerang di muka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman, Aamiin,

Penulis dalam menyusun skripsi ini, banyak menemukan hambatan dan kesulitan, tetapi berkat adanya arahan dan bimbingan serta bantuan baik secara material maupun spiritual dari semua pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak saya hanturkan dengan istimewa dan penuh rasa hormat kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Almarhum Abd Haris, Muh. Idris**, Ibunda **Hafsah** dan nenek saya **Subaedah**. Orang tua yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya, penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II, III, IV atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu didalamnya.
2. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta Wakil Dekan I, II, III atas segala fasilitas yang diberikan dan senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasihat kepada penulis.
3. Ismawati, SE., M.Si., selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah sekaligus pembimbingan I yang senantiasa memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Sumarlin, SE., M.Ak., selaku Sekretaris Jurusan sekaligus dosen penguji II beserta staf dan pegawai Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Ilham Gani, SE., MM. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan-masukan dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M. Ag. selaku penguji I atas segala masukan dan kritik yang membangun untuk peneliti.
7. Para Dosen, Karyawan/Karyawati yang berada dalam lingkungan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang sudah mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan.
8. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah 2016 khususnya GPB yang selalu menjadi media diskusi dalam berbagai hal serta semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dengan bantuannya

dapat bernilai ibadah disisi Allah swt.

9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dorongan, dukungan beserta doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. Penulis memohon ridho dan maghfirahnya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, semoga karya ini dapat bermanfaat kepada para pembaca, Aamiin.

Wassalamu'alakum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Agustus 2020

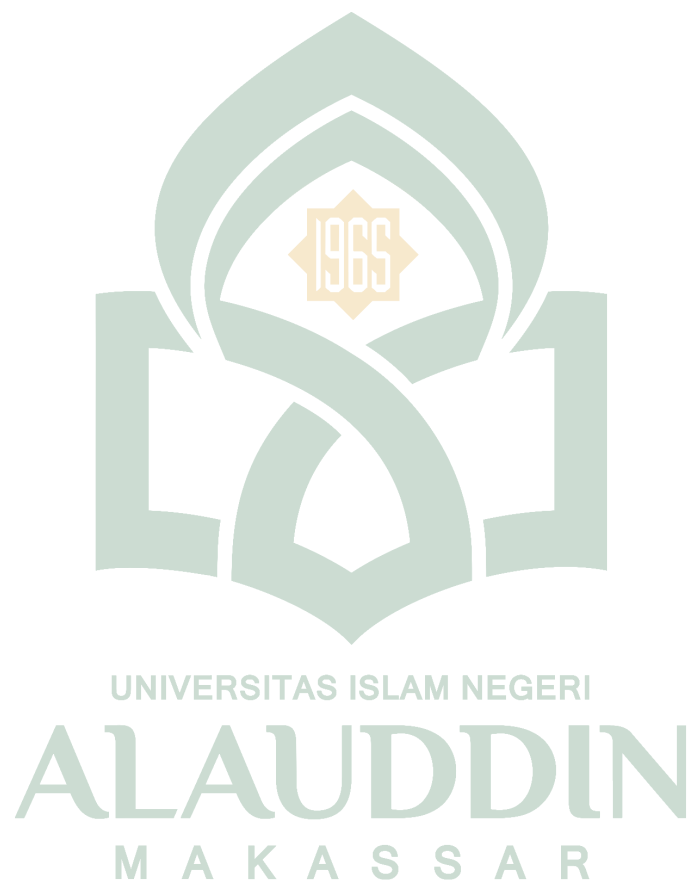
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus dan Deskripsi Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Syariah Enterprise Theory	11
B. Pembiayaan.....	12
C. Pembiayaan bermasalah	27
D. Akad Murabahah	31
E. Fatwa DSN-MUI	36
F. Kerangka Fikir.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	43
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Instrument	45
F. Metode Analisis Data	45
G. Uji Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia.....	47
B. Tinjauan Umum Pembiayaan Murabahah	48

C. Pementaan Riset Rujukan	49
D. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>
Gambar 2.2	Kerangka Pikir.....



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu.....
Tabel 2.1	Kelompok Produk Pembiayaan.....
Tabel 4.1	<i>Mapping Riset Rujukan</i>
Tabel 4.2	Permasalahan Internal Penyebab Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah.....
Tabel 4.3	Permasalahan Elsternal Penyebab Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah.....
Tabel 4.4	Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah.....

ABSTRAK

Nama : Juliana Idris
NIM : 90500116032
**Judul : Metode Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* bermasalah
Pada Bank Syariah di Indonesia: Tinjauan Fatwa Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah serta bagaimana pihak Bank Syariah menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu penelitian ini juga ingin menganalisis kesesuaian penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data subjek dan data objek yang bersumber dari data primer hasil wawancara dengan informan dan data sekunder dari jurnal-jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian yang diangkat. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yaitu uji triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Data yang diperoleh kemudian dianalisis lalu disimpulkan sebagai hasil akhir dari penelitian.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu penyebab eksternal dan internal. Adapun metode penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang digunakan terdapat tiga jenis penyelesaian yang menjadi *top ranking* yaitu: *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, eksekusi jaminan dan *write off*. Adapun metode yang digunakan oleh Bank Syariah dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Kata Kunci: *Murabahah*, *Pembiayaan Bermasalah*, *Fatwa DSN-MUI*, *Bank Syariah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Industri perbankan merupakan salah satu komponen terpenting dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Bank merupakan salah satu penggerak perekonomian sebagaimana fungsinya untuk mendistribusikan dana ke sektor riil dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan ialah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Hal tersebut karena fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*), dengan menyediakan modal bank secara tidak langsung telah membantu meningkatkan kinerja bisnis serta mengurangi pengangguran (Janni, M. A, 2018).

Perkembangan perbankan syariah merupakan perwujudan dari antusias masyarakat akan kebutuhan sistem keuangan alternatif yang tidak hanya menyediakan layanan keuangan tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Sistem yang dimaksud ialah perbankan yang bebas dari praktik bunga (*Fee Interest Banking*), lebih tegas lagi setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tersebut, bank dan bank syariah didirikan berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 1992 lalu kemudian diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 memperoleh dasar hukum yang khusus dan

lebih kuat lagi tegas. Adanya ketentuan tersebut membuka peluang bagi perbankan di Indonesia untuk melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah kini tergolong cepat, karena keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Rekomendasi hasil lokakarya tentang bunga bank ditujukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada pemerintah dan seluruh umat Islam (Syafi'i, 2001 dalam Shobirin, 2016). Semakin bervariasinya bank syariah di Indonesia disokong oleh tingginya minat masyarakat untuk menyimpan dana mereka di bank syariah. Dalam Laporan Kemajuan Bank Indonesia (2009) mencatat tren pertumbuhan dana perbankan syariah karena daya tarik produk kepada deposan diberikan bagi hasil rasio dan margin produk yang kompetitif jika dibandingkan dengan bunga bank komersial (Pratiwi, 2012 dalam Solihatun, 2017).

Pembiayaan adalah salah satu kegiatan utama dari perbankan syariah sebab pendapatan utama bank syariah berasal dari kegiatan tersebut. Pembiayaan sendiri merupakan salah satu bentuk penyaluran dana dalam bank syariah yang kemudian diberikan kepada masyarakat. Olehnya itu menyatakan bahwa bank harus memerhatikan beberapa Permasalahan dan hal-hal apa saja yang kemudian perlu dipertimbangkan dalam memutuskan pembiayaan kepada masyarakat (Mokhtar et al, 2005 dalam Mares Suci Ana Popita, 2013). Dalam memberikan pembiayaan bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*Frudential Banking System*) guna mencegah menumpuknya pembiayaan bermasalah sebagaimana yang telah diatur

dalam Undang-undang Perbankan. Dalam proses pemberian pembiayaan bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*Frudential Banking System*) dengan cara menerapkan SOP (Standar Operasional Pemberian Pembiayaan) yang berisi langkah-langkah yang diterapkan oleh bank. Selain penerapan SOP yang benar pada saat proses pemberian pembiayaan, bank juga mesti menerapkan prinsip kehati-hatian (*Frudential Banking System*) yaitu melarang beberapa pemberian pembiayaan (Artikel 230 PT. Bank Mandiri). Apabila calon nasabah tidak bersedia menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh bank sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemberian pembiayaan kepada debitur yang pernah mengalami pembiayaan macet, pembiayaan kepada mantan nasabah yang pelunasanya dilakukan secara tidak normal (Umar, 2008). Penerapan prinsip kehati-hatian ini merupakan langkah awal untuk menekan angka pembiayaan bermasalah serta melahirkan pembiayaan sehat dalam artian tepat waktu dan tepat jumlah.

Kegiatan bank sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan menghadapi berbagai risiko yang sangat perlu diperhatikan. Salah satunya ialah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah kegagalan pembiayaan yang diberikan oleh bank, dimana debitur tidak melakukan kewajiban atas pinjamannya. Bank harus mampu mengelola risiko tersebut agar tidak mengakibatkan pembiayaan bermasalah yang bisa merugikan bank. Pembiayaan merupakan produk perbankan syariah yang memiliki risiko tinggi. Hal ini relevan dengan yang diungkapkan oleh pihak Bank Muamalat Cabang Makassar bahwa kasus tersebut merupakan hal biasa yang sering terjadi pada sektor

perbankan. Namun hal tersebut perlu di perhatikan demi menekan angka pembiayaan bermasalah yang terjadi pada perbankan syariah (Lestari. M.N dan Setiawati, 2018). *Non Performing Financing* (NPF) adalah salah satu indikator pembiayaan bermasalah tentunya hal tersebut sangat perlu untuk diperhatikan sebab sifatnya yang fluktuatif. *Non Performing Financing* (NPF) adalah salah satu alat penilaian kinerja bank syariah yang menjadi tafsiran penilaian aktiva produktif, terkhusus dalam pembiayaan bermasalah (Popita. 2013).

Tunggakan angsuran pembiayaan masih menjadi masalah yang harus di hadapi dengan serius oleh perbankan di Indonesia Menurut Bank Indonesia (2015), jumlah tunggakan pembayaran perbankan Indonesia pada semester I 2015 berada pada kisaran angka 11,58%. tunggakan sebesar itu tentunya sangat berpengaruh terhadap profitabilitas sebuah perbankan. Selain itu perlambatan pertumbuhan pembiayaan juga akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah *Non Performing Financing* (NPF).

Pembiayaan dikatakan masuk kategori *Non Performing Financing* (NPF) apabila menempati tingkat kolektabilitas nasabah pembiayaan ke 3 (kurang lancar), ke 4 diragukan dan ke 5 (Macet). penyebab terjadinya masalah tersebut disebabkan oleh beberapa Permasalahan baik eksternal maupun internal. Permasalahan eksternal bisa disebabkan karena sikap dari nasabah itu sendiri, kondisi perekonomian serta keuangan. sedangkan Permasalahan internal terjadi akibat sistem dan prosedur, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan pengawasan serta adanya skema pembiayaan yang kurang tepat.

Salah satu pembiayaan jual beli di bank syariah adalah *Murabahah*. *Murabahah* merupakan transaksi jual beli barang terdiri atas harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Penjual harus transparan mengenai harga produk yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya (Rejeki, 2013). Akad pembiayaan *murabahah* berkontribusi sebesar 58% dari seluruh total pembiayaan perbankan di Indonesia (Lestari dan Setiawan, 2018). Pembiayaan *murabahah* ini terdiri atas dua jenis, yaitu *murabahah* pesanan dan tanpa pesanan. *Murabahah* tanpa pesanan merupakan akad *murabahah* di mana pihak bank tetap menyediakan produk ada atau tanpa pesanan sekalipun. Biasanya model akad ini terjadi pada trilogi bisnis antara pihak bank, nasabah, dan developer perumahan atau jenis bisnis lain yang sejenis. Sedangkan *murabahah* dengan pesanan adalah jenis akad *murabahah* di mana bank akan bertindak bilamana ada permintaan eksekusi dari nasabah. Salah satu contohnya adalah ketika nasabah ingin membeli sebuah produk dengan menggunakan produk pembiayaan perbankan.

Akad *murabahah* ini bukannya tanpa celah. Masalah ini biasanya terkait dengan *margin* dan kemungkinan atau resiko terjadinya masalah pembiayaan dikemudian hari yang dilakukan oleh nasabah. Dimana pembiayaan ini umumnya dilakukan dengan cara nasabah mengangsur cicilanya. Dari cara mengangsur itulah muncul masalah-masalah jika dari sisi nasabah dapat berupa keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran, ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran hingga nasabah yang tidak membayar angsuran karena tidak adanya kesadaran serta tanggungjawabnya sebagai nasabah. Semakin besar pembiayaan

bermasalah memberikan dampak buruk terhadap kesehatan likuiditas bank dan kemudian akan menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan para nasabah. Dengan adanya problem tersebut tentunya pihak bank mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi kepada nasabah, namun dengan pemberian sanksi tersebut pihak bank justru menuai permasalahan yang lain tak kalah rumitnya sebab masyarakat memiliki asumsi tentang pengenaan sanksi yang diberikan oleh pihak bank. Namun, dalam beberapa kasus, banyak pihak melihat bahwa pemberian sanksi yang melewati batas, tanpa meninjau dulu penyebab pengenaan sanksi, terlebih ada pula bank yang menyamakan denda dengan cara menjadikannya sebagai biaya administrasi dimana jumlahnya sama dengan jumlah cicilan terlebih apabila sanksi tersebut tidak dimasukkan ke dana sosial sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional, tetapi justru dimasukkan ke pendapatan lain-lain yang penting bisa menggenjot pendapatan bank (Fidyaningrum dan N. Jannah, 2016). Pembiayaan bermasalah juga menjadi perhatian berbagai pihak, dalam dunia akademik ikut memberikan kontribusi dengan banyaknya penelitian yang dilakukan mengenai permasalahan pembiayaan bermasalah yang banyak ditemukan di jurnal-jurnal penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti ingin menelisik lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang “**Metode Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Bank Syariah di Indonesia: Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan *murabahah* bermasalah dapat terjadi pada Bank Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana metode penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia?
4. Bagaimana kesesuaian penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan metode yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia?

C. Fokus dan Deskripsi Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan, dengan penelitian ini, peneliti akan fokus terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan wawancara serta pemetaan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pembatasan ini penting guna memperjelas arah penelitian agar sesuai dengan koridor atau tujuan dari penelitian.

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah baik dalam perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	M.F. Hidayatullah (2014)	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah bank syariah dapat melakukan restrukturisasi melalui: <i>rescheduling</i> (penjadwalan kembali); <i>reconditioning</i> (persyaratan kembali); <i>restructuring</i> (penataan kembali). Namun seandainya ketiga upaya restrukturisasi tersebut ternyata tidak berhasil, maka bank syariah dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui: penyitaan barang jaminan, badan arbitrase syariah nasional, dan penyelesaian lewat mitigasi.
2.	Azharsyah Ibrahim, Arnial Rahmati (2017)	Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permasalahan penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari 1) nasabah, 2) internal bank dan 3) Permasalahan fiktif. Teknik penyelesaian dilakukan dengan <i>metode on the spot</i> , somasi, penagihan, restrukturisasi, penualan jaminan, dan melakukan <i>write off</i> serta adanya penetapan terhadap denda.
3.	Apriliana Fidyningrum dan Nasyitotul Jannah (2016)	Analisis enyelesaian Masalah Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 (Studi	- Apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaanya maka obyek atau jaminan dapat dijual oleh nsabah melalui LKS, setelah hasil penjualan didapat maka nasabah harus melunasi sisa hutangnya kepada LKS, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang

		Kasus Pada BMT Karisma Kota Magelang)	<p>maka LKS wajib mengembalikannya namun apabila hasil penjualan lebih kecil maka sisanya tetap menjadi hutang nasabah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ditempuh oleh BMT Kharisma Kota - Magelang yaitu dengan langkah persuasif yaitu pendekatan kepada anggota melalui kunjungan ketempat anggota. alur hukum dan juga melalui lelang agunan.
4.	Muhammad Turmudi (2016).	Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah.	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan: <i>pertama</i>, menerapkan standar pengendalian risiko, pencegahan risiko juga dapat dilakukan dengan menganalisa karakter yaitu penilaian terhadap karakter calon penerima pembiayaan. <i>Capacity</i> yaitu penilaian kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. <i>Kedua</i>, dapat dilakukan dengan langkah-langkah (1) penjadwalan ulang, (2) persyaratan kembali, (3) penataan kembali, (4) Penyelesaian melalui jaminan, dan (5) Penghapusan buku.</p>
5.	Shobirin (2016).	Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bitul Maal Wa Tamwil (BMT).	<p>Dengan cara identifikasi permasalahan, menetapkan kondisi pembiayaan yang meliputi besarnya pembiayaan, b. Pentingnya masalah yang ditangani, tindakan penagihan dan perjanjian kepada nasabah. c. Tidandakan penyelesaian atau penyelamatan. d. Kemudian melakukan surat peringatan I, II, III, serta peringatan digunakan secara bertahap, e. <i>Rescheduling</i> dan <i>recondition</i> serta</p>

			lelang eksekusi jaminan.
--	--	--	--------------------------

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembiayaan *murabahah* bermasalah dapat terjadi pada Bank Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana metode penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia?
4. Bagaimana kesesuaian penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan metode yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia?

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan kontribusi pemikiran serta bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas perbankan syariah itu sendiri. Serta penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah untuk mengambil pembiayaan di bank syariah dan dapat memberikan

stigma di masyarakat bahwa penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah telah sesuai dengan prosedur syariah yaitu mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Shariah Enterprise Theory*

Shariah enterprise theory merupakan teori yang pertama kali dicetuskan oleh Iwan Triyuwono pada tahun 1999. *Shariah enterprise theory* merupakan nilai pengembangan yang didalamnya mengandung nilai-nilai keislaman. *Enterprise theory* pada mulanya hanya melingkupi aspek sosial dan pertanggungjawaban (Triyuwono, 2019). Kemudian dilakukan pengembangan guna lebih mendekatkan lagi dengan syariah, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori yang dikenal dengan istilah *Shariah Enterprise Theory* (SET) (Triyuwono, 2019).

Dalam teori *Shariah Enterprise Theory* pada dasarnya mendekatkan agar segala bentuk putusan dan tindakan yang diambil dapat diselaraskan dengan nilai-nilai keislaman yang *kaffah*. Jika kemudian diintegrasikan dengan permasalahan pembiayaan bermasalah maka teori ini ingin menekankan agar penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan pendekatan nilai-nilai islam. Secara umum *Syariah Enterprise Theory* ini berisi tiga nilai penting, yaitu pertanggungjawaban secara vertikal kepada Allah SWT, pertanggungjawaban kepada manusia dan pertanggungjawaban kepada institusi atau lembaga. Dalam hal ini pembiayaan bermasalah harus diselesaikan dengan memperhatikan hubungan antar sesama manusia dalam hal ini nasabah dan debitur, hubungan manusia dengan lembaga dan hubungan manusia, lembaga dengan Tuhan selaku *stakeholder* tertinggi.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam masyarakat di kenal istilah utang-piutang, tak hanya itu selain utang-piutang juga dikenal istilah kredit yang digunakan dalam bank konvensional beda halnya dalam perbankan syariah yang menyebutnya sebagai pembiayaan. Dalam proses utang-piutang yaitu suatu transaksi dimana ada pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak yang lain, istilah utang, kredit dan pembiayaan tidak jauh berbeda menurut persepsi masyarakat.

Dalam pembiayaan tentunya berkaitan dengan aktivitas bisnis. Maka dari itu, maka dari itu penting untuk kita mengetahui arti dari bisnis itu sendiri. Bisnis adalah aktivitas yang dilakukan guna untuk menambah nilai baik itu melalui proses perdagangan, jasa ataupun produksi. Dengan istilah lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri guna mengoptimalkan keuntungan (Ilyas, 2015).

Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang kemudian dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Jadi, prinsip syariah adalah suatu perjanjian yang dilakukan dengan berlandaskan Hukum Islam antara pihak bank dengan

pihak lain (nasabah) untuk menitipkan dana dan atau pembiayaan untuk kegiatan usaha ataupun kegiatan lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan menurut keputusan presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan pasal 1 butir 2 terdapat sedikit perbedaan yaitu terletak pada kegiatan yang berbentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung. Terdapat perbedaan antara keduanya mengenai istilah tersebut yaitu pada UU Nomor 10 Tahun 1998 dimana yang menjadi objek yaitu uang, sedangkan menurut keputusan presiden nomor 61 Tahun 1998 pasal 1 butir 2 dimana yang menjadi objek adalah uang dan barang modal.

Istilah pembiayaan pada dasarnya ialah *i believe, i trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Istilah pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan menaruh kepercayaan kepada nasabah untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan. Dimana dana tersebut digunakan dengan adil, benar dan harus disertai ikatan serta syarat-syarat yang jelas dan tidak ada pihak yang dirugikan (Ilyas, 2015). Sedangkan menurut Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, dimana pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutag* atau *qardh*.

- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau unit usaha syariah dengan pihak yang lain dimana mewajibkan pihak yang dibiayai diberikan fasilitas untuk mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* , tanpa imbalan atau bagi hasil (Ridwan dan muhammad, 2014).

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan dapat kita lihat berdasarkan beberapa aspek yaitu tujuannya, jangka waktu, jaminan dan orang yang akan menerima dan atau memberi pembiayaan. Adapun pembiayaan menurut tujuannya dibagi atas dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut tujuannya, pembiayaan dibagi atas dua, yaitu:
- b. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti pengembangan usaha, baik produksi, perdagangan ataupun investasi. Adapun menurut keperluannya, pembiayaan produktif terbagi atas dua, yaitu:
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan;
 - 2) Pengembangan produksi, baik dari segi kuantitatif yaitu jumlah produksi yang dihasilkan, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan mutu hasil dari produksi;
 - 3) Untuk keperluan perdagangan ataupun peningkatan *utulty of place* dari suatu barang;

- 4) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (Syafi'i Antonio).
- c. Pembiayaan konsumtif yaitu suatu pembiayaan yang digunakan guna memenuhi kebutuhan konsumsi dimana akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Secara garis besar produk pembiayaan berdasarkan hukum ekonomi syariah terbagi atas empat kategori lalu dibedakan atas tujuan penggunaannya:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Ba'i*)

Prinsip juala beli (*Ba'i*) adalah sebuah prinsip yang digunakan karena dengan adanya perpindahan hak milik barang atau benda (*Transfer Of Property*), dimana tingkat keuntungan ditentukan diawal dan menjadi harga atas barang yang akan dijual. Adapun transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan jangka waktu penyerahannya yaitu sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam *murabahah* sendiri pihak penjual harus transparan atas harga produk yang ia beli dan menyepakati keuntungan sebagai tambahannya (Syauqoti dan Ghozali. M, 2018). Adapun cara dalam pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pesanan dan tanpa pesanan.

b) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah pembelian suatu barang dimana penyerahannya dilakukan di kemudian hari dan pembayarannya dilakukan di awal. Dalam kaidah *fiqh* *salam* disebut juga sebagai *salaf*. Secara etimologi keduanya memiliki makna yang sama, dimana keduanya melakukan pembayaran di awal dan barangnya diserahkan di kemudian hari. Kata *salam* umumnya digunakan oleh kalangan Hijaz, sedangkan *salaf* digunakan oleh kalangan Irak (Hasan, 2002).

c) Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli pesanan yaitu antara nasabah (pembeli) dengan bank (penjual) dimana dalam akad ini spesifikasi dan harga barang yang dipesan disepakati di awal akad sedangkan pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. pembiayaan ini biasanya diperuntukan untuk sebuah perusahaan yang memiliki pesanan namun terkendala modal untuk memproduksi pesanan tersebut.

a) Pembiayaan *Ijarah*

Ijarah merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah di mana transaksi yang dilakukan berupa sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah dalam jasa dengan jangka waktu tertentu pembayarannya dilakukan dengan cara sewa atau imbal jasa. *Ijarah* dapat pula diartikan sebagai suatu akad

pemindahan hak guna terhadap suatu barang atau jasa dengan mekanisme pembayaran melalui upah sewa, namun tidak diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut (Umam dan Utomo. B. D, 2017).

1) Berdasarkan prinsip bagi hasil

Adapun jenis produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu sebagai berikut:

a) *Musyarakah*

Musyarakah berasal dari kata *syirkah*. Dimana secara bahasa ialah *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Adapun maksud dari percampuran ialah seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan (Cahyani, 2013 dalam Almunawwaroh, M. 2017). Menurut PSAK 106 tentang akuntansi *musyarakah* menjelaskan bahwa *musyarakah* adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk membuat suatu usaha, dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka akan dibagi berdasarkan porsi dana. Pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* diperbolehkan menurut syariah sesuai dengan hadits Rasulullah, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghiyanati

pihak lainya (HR. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al-Buyu' dan Hakim).

b) Pembiayaan Mudharabah

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal berasal dari salah satu pihak dan kemudian usaha dilakukan oleh pihak yang lain. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati pada saat kontrak dilakukan, sedangkan apabila dalam prosenya terjadi kerugian maka hal tersebut akan ditunggu oleh pemilik modal selama kerugian tersebut terjadi bukan karena akibat pihak pengelola (Dharma. Y dan Pristianda. A, 2018). Adapun *mudharabah* dibedakan atas dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. (Qomar, 2018). Perbedaan keduanya yaitu *mudharabah mutlaqah* adalah akad kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* tanpa adanya pembatasan spesifikasi jenis usaha yang akan dilakukan, sedangkan *mudharabah muqayyadah* sebaliknya ia dibatasi oleh jenis usaha waktu dan tempat. Adapun akad ini bisa diterapkan untuk pembiayaan modal kerja maupun investasi khusus. Dalam *mudharabah* terdapat penggabungan yaitu antara kemampuan dalam mengelola bisnis dan mengelola keuangan, dalam hal ini bank bertindak sebagai pemberi modal dan nasabah kemudian

menyediakan *capability* usaha, kemudian laba yang dihasilkan kemudian akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Adapun kerugian yang kelak akan terjadi maka akan ditanggung oleh pihak bank dan nasabah disini mengalami kerugian dalam hal tenaga dan waktu selama modal pokok tidak berkurang. Bila modal pokok berkurang maka nasabah wajib mengembalikan dan akan disebut sebagai hutang selama nasabah tidak membayarnya. Pembiayaan mudharabah ini apabila dijalankan dengan terbuka antara bank nasabah maka bermanfaat dalam hal ini menghilangkan kesan antara majikan dan anak buahnya.

c) Pembiayaan dengan menggunakan akad pelengkap

Untuk mempermudah jalanya pembiayaan, diperlukan beberapa akad pelengkap. Tujuan dari akad pelengkap ini adalah untuk mempermudah jalanya pembiayaan. Adapun jenis-jenis akad pelengkap yaitu sebagai berikut :

➤ *Hawalah* (Alih hutang-piutang)

Secara etimologi *hawalah* berarti “Mengalihkan” atau “memindahkan”. Dalam istilah *fiqh hawalah* berarti pemindahan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menaggung hutang(Mahmuda, 2018). Dalam *hawalah* terjadi perpindahan hak antara orang yang satu ke pada orang lain. Penagihan pengalihan

hutang sendiri diperbolehkan oleh syariah dan telah dilakukan oleh kaum muslimin sejak pada zaman Nabi hingga saat ini.

➤ *Rahn* (gadai)

Rahn merupakan suatu perjanjian penyerahan barang yang menjadi agunan atau sebagai jaminan atas pelunasan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Adapun barang yang menjadi agunan disebut sebagai *al-marhun*, dan pihak yang memberikan jaminan disebut *ar-rahin*, dan pihak yang memperoleh jaminan atau yang memegang jaminan disebut sebagai *al-murtahin*. Ulama mazhab maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang sifatnya mengikat. Adapun *rahn* di tangan *al-murtahin* hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *ar-rahin*. Adapun jika suatu saat *rahn* yang digunakan untuk menjamin utang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan apabila sewaktu-waktu tidak dapat dilunasi oleh yang berutang. Dalam hal ini apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya, maka agunan tersebut dijual dan hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang tersebut.

➤ *Qard* (penyediaan dana tagihan)

Qard merupakan penyediaan dana yang dilakukan oleh pihak bank dengan pihak peminjam dimana pihak peminjam diwajibkan untuk melakukan pembayaran baik sekaligus ataupun dengan cara

mengangsur berdasarkan jangka waktu yang telah disepakat (Ilyas, 2015).

➤ *Wakalah* (perwakilan)

Iqbal dan Mirakhor mendefinisikan bahwa akad *wakalah* berarti menunjuk seseorang atau suatu badan hukum untuk bertindak atas nama orang lain atau sebagai perwakilan seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa *wakalah* ialah mewakilkan atau melimpahkan tugas kepada orang lain namun yang perlu digaris bawahi ialah orang yang diberikan limpahan tetap harus melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pihak yang melimpahkan.

➤ *Kafalah* (garansi)

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful'anhu, ashil*). Menurut Bank Indonesia *kafalah* adalah akad pemberian jaminan (*makfil alaih*) yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

a. Dasar hukum pembiayaan

1) Dalam surat an-nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (QS. An-nisa :29)

- 2) Firman Allah tentang pembiayaan atau hutang juga terdapat dalam surat

Al-Baqarah Ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah: 280).

- 3) Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Terjemahan:

Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (alhikmah.ac.id).

4) Syarat Sahnya pembiayaan

Sebelum melakukan suatu pembiayaan, hal utama yang perlu dilakukan ialah membuat perjanjian atau akad. Di dalam pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 syarat suatu perjanjian dikatakan sah, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikat diri (*sighat al-aqd*).

Sepakat yang dimaksud di sini ialah apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu disetujui oleh pihak yang lainnya. Suatu kesepakatan

tidak sah apabila ada unsur keterpaksaan (*dwang/ikrah*), kekhilafan (*dwaling/ghalath*) atau penipuan (*bedrog/taghrir-tadlis*).

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dijelaskan dalam KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan. Dalam pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- 3) Perempuan yang dalam hal ini ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.
- 4) Suatu hal tertentu (*mahal Al-aqd/ Al-ma'qud alaih*)

Maksud dari hal tertentu ialah mengenai hak-hak serta kewajiban para pihak yang harus dapat disepakati dengan jelas dalam perjanjian yang bersangkutan, misalnya: dalam perjanjian pembiayaan harus dicantumkan secara jelas mengenai hal-hal yaitu sebagai berikut:

- a. Maksimum pembiayaan yang diberikan (*plafond* pembiayaan).
- b. Tujuan pemberian pembiayaan.
- c. Tanggal jatuh tempo pembiayaan.
- d. Kewajiban nasabah yang menerima fasilitas untuk melunasi utang pokok, imbalan, dan biaya lainya berkenaan dengan

pembiayaan yang diberikan bank ataupun koperasi (Wangsawidjaja, 2010 50-52).

e. Suatu sebab yang halal (*maudhu' al-aqd*)

Sebab yang halal yang dimaksud ialah apa yang menjadi tujuan bersama atau apa yang dikerjakan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut bukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, dan tidak melanggar kesusilaan.

5) Proses pengajuan pembiayaan

Menurut Muhammad Ali prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan. Dalam menjalankan sebuah prosedur, terdapat etika atau aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan agar apa yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien juga untuk menghindari risiko yang kemudian akan muncul.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan memiliki beberapa prosedur yang harus dipatuhi yaitu sebagai berikut:

a. Persiapan

Pada tahap persiapan pembiayaan merupakan tahap awal yang sangat penting terutama bagi pihak nasabah yang notabenenya pertama kali mengajukan permohonan pembiayaan. Dalam hal ini tentu pihak lembaga akan menggali informasi mengenai nasabah, dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Informasi tersebut harus memiliki gambaran yang valid mengenai kondisi usaha nasabah yang bersangkutan mengenai besarnya usaha, jumlah pembiayaan yang

diminta, tujuan penggunaan dari pembiayaan, lokasi usaha, jaminan, dan kelengkapan surat-suratnya serta peralatan yang dimiliki. Pihak bank akan memberikan formulir permohonan pembiayaan pada calon nasabah dimana berisi keterangan mengenai informasi yang diperlukan.

Laporan permohonan pembiayaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keterangan mengenai permohonan pembiayaan yang diminta.
- 2) Hubungan kredit dimasa lalu.
- 3) Keterangan tentang pembiayaan yang diminta.
- 4) Gambaran usaha.
- 5) Rencana atau proyek usaha 3 tahun kedepan bilamana pembiayaan diberikan.

a. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan sendiri dilakukan oleh *Account Officer* suatu lembaga keuangan level jabatannya berada pada level seksi atau *commite* yang memiliki tugas untuk menganalisis permohonan pembiayaan nasabah. Analisis dilakukan guna mencapai sasaran dan aman. Dalam tahap ini terdapat beberapa penilaian mendalam mengenai kondisi usaha nasabah yaitu meliputi aspek sebagai berikut:

- 1) Aspek manajemen dan organisasi
- 2) Aspek pemasaran
- 3) Aspek keuangan
- 4) Aspek hukum
- 5) Aspek teknis

6) Aspek sosial ekonomi

b. Analisis Pembiayaan Dalam Praktik

Analisis untuk pembiayaan merupakan suatu hal yang penting untuk merealisasi pembiayaan. Analisis dilakukan oleh aparat khusus yang pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha tersebut telah memenuhi prinsip syariah atau tidak serta bertujuan untuk:

- 1) Menilai kelayakan usaha calon nasabah
- 2) Meminimalisir atau menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- 3) Menghitung kebutuhan pembiayaan layak

c. Tahap Keputusan Pembiayaan

Dalam tahap keputusan pembiayaan pihak bank melalui pemutus pembiayaan, baik berupa seorang pejabat yang di amanahkan untuk memutuskan apakah pembiayaan tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak, maka permohonan tersebut harus segera ditolak. Penolakan biasanya dilakukan secara tertulis dengan disertai beberapa alasan secara diplomatis namun cukup jelas. Sebab bilamana permohonan dikabulkan, maka segera dituangkan di dalam surat keputusan pembiayaan. Biasanya disertai beberapa syarat tertentu yaitu sebagai berikut:

- 1) Nama dan alamat perusahaan
- 2) Nama pemilik
- 3) Jenis pembiayaan yang dipilih

- 4) Tujuan penggunaan
- 5) Jangka waktu
- 6) Cara penarikan
- 7) Cara pengambilan
- 8) Margin
- 9) Masa tenggang
- 10) Jaminan yang diberikan serta nilainya
- 11) Pengikat jaminan dan syarat lainnya.

Dan di akhir surat dicantumkan tanda tangan dan nama jelas, dilengkapi dengan tempat dan tanggal penandatanganan dilakukan. Pemutus pembiayaan adalah seorang pejabat bank atau komite khusus yang diberi tanggungjawab untuk tugas tersebut. Kewenangan dalam memutus belum tentu sama dengan yang lainnya tergantung dari tingkat jabatan kedudukan serta pangkatnya.

C. *Pembiayaan bermasalah*

1. Pengertian

Pembiayaan merupakan produk perbankan syariah yang memiliki risiko yang cukup tinggi apabila nasabah tak mampu membayar angsurannya, akibatnya terjadilah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh jumlah uang dari jumlah yang disepakati dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah ditetapkan (Turmudi, M. 2016).

Dalam(Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Pasal 12 ayat 3)

praktik perbankan kualitas pembiayaan terbagi atas 5 kategori:

- a. Lancar apabila nasabah mampu membayar angsuran sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.
- b. Dalam perhatian khusus yaitu suatu kondisi dimana nasabah menunggak namun tak melampaui 90 hari.
- c. Kurang lancar yaitu dimana nasabah tidak membayar angsuran melebihi 90 hari.
- d. Diragukan yaitu apabila terdapat tunggakan selama 180 hari.
- e. Kredit macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok beserta bunga yang melampaui 270 hari.

Contoh kriteria penilaian kualitas pembiayaan dari segi kemampuan bayar berdasarkan kelompok produk pembiayaan (Djamil,F. 2014).

Tabel 2.1 Kelompok Produk Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Mudharabah dan Musyarakah	Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu; dan atau RP sama atau lebih dari 80% PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari dan atau lebih dari 80% PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang melampaui 90 hari dan atau diatas 30% PP s.d 80% PP (30%	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 120 hari s/d 180 hari dan atau RP<30% PP	Terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 180 hari dan atau RP,30% PP lebih dari 3 periode pembayaran.

			PP < RP < 80% P P)	lebih dari 3 periode pembayaran .	
Murabaha h, Isthisna, Qard, Multijasa	Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin s.d 90 hari.	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari s.d 180 hari.	Terdapat tunggakan angsuran pembayaran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari s.d 270 hari.	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari.
Ijarah	Pembayaran sewa tepat waktu.	Terdapat tunggakan sewa s.d 90 hari.	Terdapat tunggakan sewa melewati 90 hari s.d 180 hari.	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari s.d 270 hari.	Terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 hari.
Salam	Piutang salam belum jatuh tempo.	Piutang salam telah jatuh tempo s.d.30 hari.	Piutang salam telah jatuh tempo s.d 60 hari.	Piutang salam telah jatuh tempo s.d 90 hari.	Piutang salam telah jatuh tempo melebihi 90 hari.

2. Dasar Hukum

a. Firman Allah SWT tentang pembiayaan bermasalah terdapat dalam Q.S yusuf ayat 67

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

شيءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

Terjemahan:

Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu

gerbang yang berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri".

3. Permasalahan-Permasalahan Pembiayaan Bermasalah

Adapun Permasalahan-Permasalahan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh tiga unsur yaitu (1) pihak bank (*kreditur*), (2) *debitur*, (3) diluar pihak *debitur* dan *kreditur*. Permasalahan kreditur ialah Permasalahan yang disebabkan oleh kinerja dari bank yang sifatnya mikro, sedangkan dalam Permasalahan debitur yaitu pihak pengguna dana bersifat makro.

4. Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak bank yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penyelesaian melalui barang jaminan serta penghapusbukuan.

- a. Penjualan (*rescheduling*) yaitu merubah jadwal pembayaran nasabah ataupun merubah jangka waktu pembayarannya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) ialah perubahan seluruh atau sebagian prasyarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian ptpngan sepanjang tidak mengubah saldo pembiayaan atau piutang.
- c. Penataan kembali (*restructuring*) diberikan kepada nasabah yang kesulitan dalam membayar angsurannya yaitu pokok dan bunga kredit namun masih memiliki prospek yang baik dan mampu membayar

kewajiban setelah restrukturisasi dilakukan (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Pasal 1).

- d. Eksekusi jaminan, jaminan diinterpretasikan sebagai jaminan kepastian hukum kepada pihak bank artinya bahwa barang yang dijaminka oleh nasabah harus siap apabila sewaktu-waktu akan dieksekusi gunanya ialah untuk melunasi hutang nasabah.
- e. Penghapusbukuan gunanya ialah untuk mengeluarkan rekening aset yang sudah tidak produktif dari pembukuan. Namun meski telah dihapus hal itu hanya bersifat administratif sehingga penagikan terhadap nasabah tetap dilakukan.

D. Akad Murabahah

1. Pengertian

Murabahah adalah sebuah pergeseran kepemilikan sesuatu yang dimiliki kemudian dijual dengan harga pertama lalu diberikan sedikit tambahan keuntungan. Dari definisi diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya intinya adalah sama, bahwa murabahah adalah suatu kegiatan jual beli dimana pihak penjual harus transparan atas harga pertama dari barang tersebut kepada pembeli dan kemudian ditambahkan keuntungan atas penjualan tersebut berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan dan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank (Hitam, 2015).

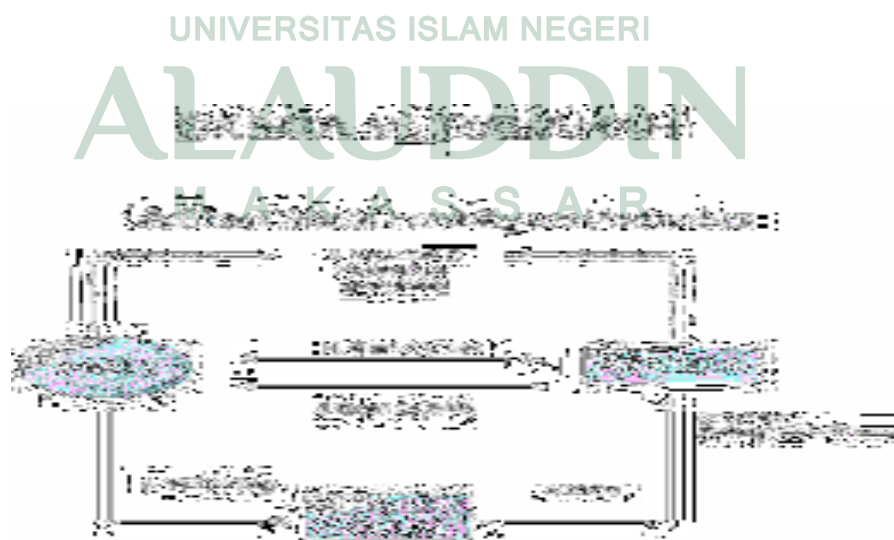
Dalam pembiayaan murabahah bank yang bertindak sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan, kemudian pihak bank menjualnya ke nasabah

dengan menambahkan keuntungan. Lalu nasabah mengembalikan dana tersebut dengan cara mengangsur atau cicil setiap bulanya sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh keduanya.

Murabahah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa aka *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menggunakan prinsip transparansi dimana harga beli suatu barang harus ditegaskan kepada pihak pembeli dan pembeli membayarnya beserta dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dijelaskan bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli kemudian pembeli membayarnya dengan harga beserta dengan keuntungan.

Berdasarkan uraian di atas tentang *murabahah*, maka proses transaksi *murabahah* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1



2. Dasar Hukum

Dalam akad *murabahah* sendiri ada beberapa acuan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Qur'an surah Al-Baqarah: 275

وَأَحْلَلْنَا لَكُمْ ذِكْرَ الْمَالَ بَعْدَ حَرَمِ الرِّبَا

Terjemahan:

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

- b. Qur'an surah An-nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yyang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesam kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

- c. Hadis riwayat al-Bazzar dan disahkan oleh Al-Hakim

: عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

“Bahwa Nabi SAW ditanya: Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhal?, Beliau menjawab: pekerjaan seseorang laki-laki dengan tanganya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur” (<https://pengusahamuslim.com>)

- d. Prinsip Syariah

Dalam pengoprasionalanya, perbankan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 2 disebtykan bahwa kegiatan usaha yang

berdasarkan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha tidak mengandung unsur yaitu sebagai berikut:

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak adil.
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu yang tak pasti dan sifatnya untung-untungan.
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak.

e. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut (Zulkifli, 2003: 40):

1) Pihak yang berakad (*bai' dan musytari'*):

- a) Cakap menurut hukum
- b) Tidak dengan terpaksa

2) Objek akad (*mabi'*):

- a) Barang tidak terlarang oleh *syara'*
- b) Penyerahan barang dapat dilakukan
- c) Yang berakad memiliki hak penuh

3) Harga (*tsaman*):

- a) Memberitahukan harga perolehan

b) Keuntungan disepakati bersama

4) Ijab Kabul (*sighat*)

a) Jelas

b) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang

c) Tidak dibatasi waktu

b. Syarat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* yaitu sebagai berikut (Antonio, 2001: 102):

- 1) Penjual harus memberitahu harga pokok pembelian kepada pembeli;
- 2) Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan;
- 3) Kontrak bebas dari *riba*;
- 4) Apabila ada kecacatan pada barang pihak penjual harus menjelaskannya kepada pihak pembeli;
- 5) Pihak penjual harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya apabila pembelian dilakukan dengan cara hutang.

5. Tujuan *Murabahah*

Menurut al-Marghinani, tujuan dari *murabahah* adalah untuk melindungi konsumen yang tidak berdaya terhadap tipu muslihat para pedagang yang curang karena konsumen tersebut tidak memiliki keahlian untuk dapat melakukan jual-beli. Seseorang yang tidak memiliki keterampilan untuk melakukan pembelian di pasar dengan cara *musawwah*, seyogianya menghubungi seorang *dealer* *murabahah* yang dikenal kejujurannya dan

membeli barang yang dibutuhkannya dari *dealer* tersebut dengan membayar harga perolehan *dealer* tersebut atas barang itu ditambah dengan keuntungan. Dengan cara seperti itu, konsumen tersebut akan terpuasakan dan terlindungi dari kecurangan (Sjahdeini. S. R, 2014: 226)

E. Fatwa DSN-MUI

1. Fatwa

a. Pengertian

Fatwa berasal dari bahasa arab yang artinya nasihat adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. adapun maksudnya ialah sebuah nasihat yang diambil oleh suatu lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yang dimana disampaikan oleh seorang ulama, sebagai tanggapan atau jawaban atas sebuah pertanyaan. Fatwa sendiri digunakan dalam kehidupan beragama, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan atas suatu persoalan.

b. Macam-macam bentuk fatwa

Fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori utama yaitu; *pertama*, fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik; *kedua*, fatwa mengenai masalah ibadah dan masalah yang berkaitan dengan sistem keagamaan dan sistem kemasyarakatan, seperti perkembangan pemikiran dan aliran keagamaan, masalah kesehatan, masalah kenegaraan,

dan lain sebagainya; *ketiga*, fatwa yang berkaitan mengenai masalah ekonomi Islam dan aktivitas lembaga keuangan syariah.

Fatwa dalam bentuk pertama dan yang kedua ditetapkan oleh komisi fatwa MUI, sementara fatwa dalam bentuk ketiga ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

2. DSN-MUI

a. Pengertian

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama* dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum Muslimin di seluruh Indonesia berdasarkan Islam yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khair ummah*), dan jasmaniah yang diridhai Allah. (MUI.or.id)

b. Tugas dan Wewenang

Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga yang memiliki otoritas yaitu pembuat fatwa dalam bidang ekonomi syariah dimana memiliki beberapa tugas serta wewenang. Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang dimuat dalam Bab IV Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 01 Tahun 200, adapun tugas dan wewenangnya ialah sebagai berikut.

1. Tugas Dewan Syariah Nasional ialah:

- a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b) Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c) Mengeluarkan fatwa atau produk dan jasa keuangan syariah.
- d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

2. Wewenang Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut:

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak segera diindahkan.

3. Kedudukan

Adapun kedudukan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ialah sebagai berikut:

1) Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.

2) Dewan Syraiah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.

4. Sejarah

Perkembangan pesat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dirasa memerlukan aturan-aturan yang berkaitan dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip syariah. Persoalan kemudian muncul akibat instansi regulator yang seharusnya memiliki otoritas mengatur serta mengawasi LKS, yaitu Bank Indonesia (BI) untuk perbankan syariah dan Kementerian Keuangan untuk lembaga keuangan nonbank, tidak mampu menjalankan tugasnya di bidang syariah (Adam, P, 2018).

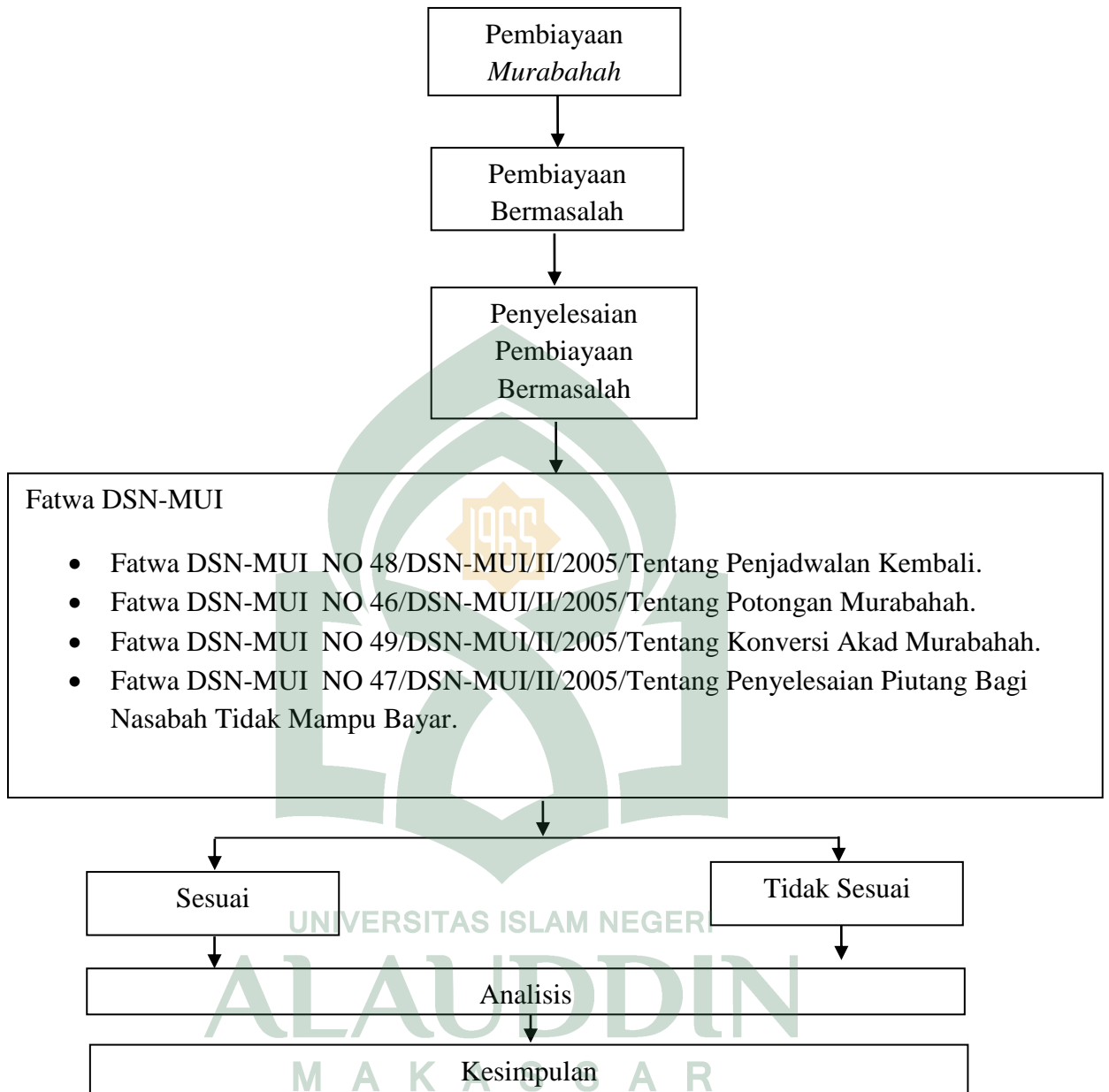
Rencana pembentukan Dewan Syariah Nasional telah dibicarakan yaitu pada Tahun 1990 yaitu ketika diadakanya lokakarya dan pertemuan yang bahas mengenai bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan merekomendasikan kepada pemerintah agar memfasilitasi pendirian bank yang berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 1997 MUI mengadakan

lokakarya yang membahas mengenai reksadana syariah dan salah satu rekomendasinya ialah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Pada pertemuan tanggal 14 oktober 1997 telah disepakati pembentukan DSN. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti sehingga DSN resmi dibentuk yaitu pada tahun 1998 (M. Cholil Nafis, 2011).

F. *Kerangka Fikir*

Dalam melakukan sebuah penelitian ada beberapa model pemikiran yang dikembangkan agar penelitian tersebut dilakukan secara sistematis dan dengan mudah dipahami, adapun model yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan judul yang diangkat **“Metode Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Bank Syariah di Indonesia: Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia”**

Gambar 2.2



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut (Syaodih, 2008) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Hal tersebut bermakna bahwa penelitian kualitatif mempelajari suatu pada sudut pandang alamiahnya, menerjemahkannya kemudian melihat fenomena yang dapat dipahami oleh manusia (Yin, 2011).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Alasan yang utama dari pemilihan jenis penelitian kualitatif adalah kemauan dari diri sendiri untuk lebih memahami langkah-langkah yang ditempuh oleh bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, menurut (Sugiyono, 2008) kualitatif deskriptif adalah penelitian yang biasanya digunakan untuk meneliti perkara objektif di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Studi deskriptif berfokus pada penjelasan terkait topik yang dikaji secara sistematis namun tetap pada bahasan permukaan yang tidak terlalu mendalam. Penelitian ini

hanya sebatas memaparkan tanpa menguraikan temuan-temuan objektif yang menjadi dasar pembuatan hasil penelitian.

Penelitian deskriptif dipilih dalam penelitian ini guna mendeskripsikan apa saja cara atau metode yang digunakan oleh pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah. Data dan informasi terkait topik tersebut setelah direkap kemudian dideskripsikan atau dijelaskan secara umum sebelum dijadikan suatu hasil akhir penelitian yang sifatnya objektif.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek dan data objek, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak informan serta data dokumenter. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data objek yang merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder hasil olahan atau lembaga lain. Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat mendukung keberhasilan penelitian ini. Data-data sekunder yang digunakan pada hasil penelitian ini berupa hasil penelitian, jurnal, skripsi dan juga tesis. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara peneliti melakukan wawancara baik dengan pihak bank ataupun pakar yang paham akan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

(Hasan, 1963 dalam Garabiyah, 1991) wawancara adalah sebuah interaksi bahasa yang dilakukan secara langsung antara dua orang dalam situasi dimana saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinanya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara mengambil dokumen yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan sejenisnya hal tersebut dilakukan guna memperoleh hasil yang lebih kredibel.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan sebuah proses di mana peneliti mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai sumber yang kredibel. Informasi tersebut dapat diperoleh dari jurnal penelitian, buku-buku, ataupun dari berbagai sumber yang relevan dengan apa yang diteliti.

d. *Internet Searching*

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

E. Instrument

Instrument penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses memngumpulkan data agar penelitian yang dilakukan terstruktur dan sistematis. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pedoman wawancara, cheklist wawancara yang dilakukan, alat tulis dan alat perekam.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama analisis data adalah menyediakan infromasi untuk pemecahan masalah (Kuncoro, 2013: 197). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Peneliti akan membangaun kesimpulan penelitian dengan mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat dalam data-data tersebut. Analisis data dilakukan secara paralel selama penelitian (tanpa menunggu penelitian selesai seluruhnya). Analisis data dianggap selesai dilaksanakan apabila peneliti merasa telah mencapai apa yang diperlukan, kemudian menganalisis data tersebut baik hasil wawancara maupun data lapangan

G. Uji Keabsahana Data

Dalam pemilihan metode pada suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting. Menurut Sugiyono (2013:270) uji keabsahan data dalam penelitian

kualitatif terbagi atas 4 yaitu uji crediabilty (validitas internal), tranferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas), dan confirmability (obyektifitas). Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua uji yaitu uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif, dimana credibilitiy dapat dicapai dengan kemampuan seorang peneliti untuk berbaur dengan pihak responden dalam beberapa waktu dan kemudian terus melakukan konfirmasi (Afiyanti, 2008). Kemudian berdasarkan sumber data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi ini adalah teknik yang digunakan untuk mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang telah dikumpulkan guna mengecek dan membandingkan. Maka metode yang tepat untuk digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber data, yaitu menggali informasi dengan melakukan beberapa metode dan sumber pemilihan data. Misalnya, melakukan wawancara dengan informan, bisa juga menggunakan sumber lain seperti dokumen tertulis, catatan resmi, atau tulisan pribadi gambar ataupun foto.
2. Triangulasi metode, yaitu menggali kebenaran suatu informasi dengan menggunakan berbagai metode dan sumber. Misalnya sumber data utama adalah *annual report* kemudian peneliti bisa menambahkan sumber data lainnya seperti berita-berita. Dengan masing-masing cara tersebut dapat memperoleh bukti atau data yang berbeda dan akan memberikan pandangan yang berbeda pula dengan fenomena yang sedang diteliti. Dengan pandangan tersebut melahirkan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia

Munculnya perbankan syariah di Indonesia dimulai dari lokakarya “Bunga bank dan perbankan” yaitu pada tanggal 18-20 Agustus 1990, dan kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertempat di Hotel Said, Jakarta, yaitu pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Adapun hasil dari Munas tersebut, MUI membentuk tim *Steering Commite* dimana ketuanya ialah Dr. Ir. Amin Azis, di mana ia bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pendirian bank syariah di Indonesia. Adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat, terbentuklah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 di Jakarta sesuai dengan akte pendirian oleh notaris Yudo Paripurno, S.H dengan surat menteri kehakiman No. C. 2. 2413 HT. 01. 01. Kemudian, berdasarkan surat izin prinsip dari menteri keuangan Republik Indonesia No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, Bank Muamalat secara resmi beroperasi pada tahun 1998 pertumbuhan perbankan syariah stagnan (Ikatan Bankir Indonesia, 2018).

Latar belakang dari kejadian tersebut adalah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 lalu diikuti dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang perbankan, dimana isinya mengatur tentang peluang usaha bank syariah bagi bank konvensional, adapun perkembangan bank syariah dimulai pada saat didirikannya

bank mandiri syariah yaitu pada tahun 1999 serta Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI Syariah pada tahun 2000, serta bank syariah lainnya. Setelah sepuluh tahun UU Nomor 10, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU Nomor 20 tentang sukuk dan Undang-undang Nomor 21 tentang perbankan syariah pada tahun 2008. Perkembangan bank syariah di Indonesia ialah perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem yang dapat menyediakan jasa perbankan yang sehat dan bebas dari unsur *riba* dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Tinjauan Umum Pembiayaan Murabahah

1. Definisi

Murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang ada di bank syariah di mana murabahah merupakan jual beli barang pada harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli murabahah, penjual haruslah transparan memberitahu harga barang yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahan. Dominasi pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut memiliki keuntungan yang cukup besar bagi bank syariah. karena adanya kepastian bagi pembeli dimana pihak bank tidak akan membeli suatu barang sebelum ada pembeli yang memesan artinya ialah bank tidak akan rugi sebab tidak menyetok barang, adanya kepastian keuntungan atas penjualan barang yang dilakukan serta pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada jaman sekarang. (Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, 2017).

2. Regulasi

Murabahah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menggunakan prinsip transparansi dimana harga beli suatu barang harus ditegaskan kepada pihak pembeli dan pembeli membayarnya beserta dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dijelaskan bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli kemudian pembeli membayarnya dengan harga beserta dengan keuntungan.

3. Syarat pembiayaan *murabahah*

Bank Syariah dari Teori ke Praktik yang ditulis oleh Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa terdapat enam syarat khusus yang harus dipenuhi yaitu: Penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba, penjual harus menjeleaskan kepada pembeli jika terjadi kecacatan atas barang sesudah pembelian.

C. Pementaan Riset Rujukan

Sumber data penelitian ini adalah berbagai literatur, penelitian, atau riset yang membahas topik dan permasalahan yang sama atau mirip terkait dengan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada bank syariah di Indonesia. Rujukan-rujukan tersebut diperoleh dari berbagai referensi yang kiranya memenuhi kualitas

standar ilmiah untuk dijadikan sebagai referensi penelitian. Rujukan-rujukann tersebut kemudian dipetakan kedalam *mapping model* dalam tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Mapping Riset Rujukan

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Sumber/ Referensi
1.	M.F.Hidayatulla h. 2019	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah	Penyelesaian Pembiayaan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah bank syariah dapat melakukan restrukturisasi melalui: <i>rescheduling</i> (penjadwalan kembali); <i>reconditioning</i> (persyaratan kembali); <i>restructuring</i> (penataan kembali). Namun seandainya ketiga upaya restrukturisasi tersebut ternyata tidak berhasil, maka bank syariah dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui: penyitaan barang jaminan, badan arbitrase syariah nasional, dan penyelesaian lewat mitigasi.	<i>Jurnal Interest</i> 12(1): 6 7-80.
2.	Rizky Fadillah Margolang. 2018	strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad murabahah dalam perspektif ekonomi islam.	Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Mandiri KC Gadjia Mada yaitu melakukan pendekatan ke nasabah, pebagihan intensif, <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>restructuring</i> dan penghapusbukuan.	Skripsi uin sumatera utara.
3.	Nurjannah. 2016	Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada	Dalam tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah, adapun	Skripsi IAIN Purwekerto.

		pembiayaan murabahah di bank syariah di bank syariah mandiri cabang purwekerto	strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Purwekerto adalah stay strategy atau dengan kata lain <i>cooperative strategy</i> , yakni strategi yang digunakan apabila pihak bank masih ingin menjalin hubungan bisnis dengan nasabah, Dstrategi ini dilaksanakan melalui upaya restrukturisasi (seperti <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , dan <i>restructuring</i>).	
4.	Ahmad Solihin. 2015	Strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di bank bni syariah cabang yogyakarta.	Strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ialah dengan cara <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>rekapitulation</i> dan penyitaan agunan.	Skripsi UIN Syarif Kasim Riau.
5.	Daryoko. 2016	Strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di bank bni syariah cabang yogyakarta	Strategi yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah (a). Untuk nasabah kolektabilitas 1 (lancar) dengan pemantauan saldo blokir angsuran <i>Earning Warning Siste</i> (EWS) dan SMS Bluster oleh divisi RRD dan unit <i>Processing</i> . (b). Untuk nasabah kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus) dilaksanaka unit <i>processing</i> yaitu pegawai asisten <i>collection</i> dengan cara SMS, ditelepon, penagihan secara langsung atau dengan menyurati dan melaksanakan R3 yaitu	Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

			<p><i>restructuring, rescheduling, reconditioning.</i> (c). Strategi untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah nasabah pembiayaan murabahah dengan kolektabilitas 3 (kurang lancar), kolektabilitas 4 (diragukan), Kolektabilitas 5 (macet), pengelolaan dan penagihan oleh bagian <i>recovery</i> dan emmedial (RUU) dengan menggunakan strategi penagihan <i>recovery</i> pembiayaan R3 (<i>restructuring, rescheduking, reconditioning</i>) sepanjang pihak nasabah masih kooperatif dan sesuai dengan ketentuan syariah dan atas kesepakatan bersama dalam perjanjian pembiayaan murabahah.</p>	
6.	Arum Fitriana Rohmah. 2018	Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah	<p>Dilakukan tindakan penyelamatan yaitu dengan melalui lembaga-Upaya penyelamatan pembiayaan dilakukan oleh bank dengan melakukan musyawarah dengan debitur <i>murabahah</i> bermasalah dalam mencari solusi terbaik melalui upaya <i>rescheduling, reconditioning</i> dan <i>restructuring</i> terhadap pembiayaan murabahah bermasalah dengan debitur yang masih kooperatif dan mempunyai kemauan dan etika baik. Sedangkan upaya</p>	Jurnal PRANATA.

			penyelesaian pembiayaan dilakukan terhadap pembiayaan murabahah bermasalah yang dipandang sudah tidak dapat lembaga lain diluar bank yang bersetujuan untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan.	
7.	Nur Melinda Lestari, Setiawati, 2018.	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing.	Bank muamalat dalam meminimalisir pembiayaan yaitu dengan cara memonitoring aktif dan memonitoring pasif. Monitoring aktif, mengunjungi secara reguler dan memberikan laporan kunjungan nasabah/ <i>call report</i> kepada komite pembiayaan/ supervisor, Monitoring pasif, yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank setiap akhir bulan. Kedua, Restrukturisasi pembiayaan, rekondisi, reschedule dan penjualan jaminan (sukarela atau litigasi).	Jurnal Ekonomi Islam.
8.	Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati. 2017	Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah : kajian pada produk murabahah di bank muamalat indonesia banda aceh.	Secara spesifik kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMI dilakukan melalui OTS, penagihan, ssomasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan <i>write off</i> dan adanya penetapan terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah.	Iqtisodiah, jurnal ekonomi dan bisnis islam.
9.	Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, Syarifaj	Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada	Dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, strategi yang digunakan	<i>Jurnal of islamic economics and</i>

	Gustiawati. 2019	Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor	oleh Bank BNI Syayriah Bogor <i>Stay Strategy</i> , yakni strategi yang digunakan apabila pihak bank masih ingin menjalin hubungan bisnis dengan nasabah. Strategi ini dilaksanakan melalui upaya	<i>banking</i>
10.	Melika Lulu Oktaviani. 2018	Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dengan fatwa dsn mui.	Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BTN Syariah cabang serang melakukan konsep restrukturisasi, dimana dalam konsep tersebut terdapat beberapa tahapan penyelesaian yaitu : panggilan intensif, pemberian surat peringatan, <i>rescheduling</i> , penghapusan buku, eksekusi jaminan.	Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tabel 4.2
Permasalahan internal penyebab pembiayaan
murabahah bermasalah

N0.	Permasalahana	Frekuensi	Presentase	Rangking
1.	Kualitas pejabat	14	36,84%	1
2.	Pengawasan	8	21,05%	2
3.	Ketidaktepatan kebijakan	7	18,43%	3
4.	Gagap Teknologi	3	7,90%	4
5.	Sarana dan prasarana	1	2,63%	5
6.	Persaingan antar bank	2	5,26%	6
7.	Hubungan intetrnal	2	5,26%	6
8.	Pelayanan pada nasabah	1	2,63%	7
Jumlah		38	100%	-

Sumber: *Data olahan peneliti (2020)*

Berdasarkan Tabel 4.2 ada berbagai Permasalahan internal yang menyebabkan timbulnya pembiayaan *murabahah* bermasalah pada bank syariah. Tiga di antaranya dengan frekuensi terbesar yaitu: kualitas pejabat, pengawasan dan ketidak tepatan kebijakan. Disamping ketiga ini, banyak Permasalahan internal lain dengan frekuensi yang lebih rendah juga menjadi penyebab hadirnya pembiayaan *murabahah* bermasalah.

Tabel 4.3
Permasalahan eksternal penyebab pembiayaan
murabahah bermasalah

NO	Permasalahan	Frekuensi	Presentase	Rangking
1.	Sikap dan perilaku nasabah	10	34,48%	1
2.	Bencana Alam	4	13,80%	2
3.	Krisis ekonomi	3	10,34%	3
4.	Ketidakmampuan nasabah memenuhi AMDAL	3	10,34%	3
5.	Manajemen keuangan	3	10,34%	3
6.	Sosial politik	2	6,89%	4
7.	Perubahan regulasi instansi terkait.	2	6,89%	4
8.	Agunan	1	3,44%	5
9.	Usaha nasabah	1	3,44%	5
Jumlah		29	100%	

Sumber : Data olahan peneliti (2020)

Berdasarkan Tabel 4.3 ada berbagai Permasalahan eksternal yang menyebabkan timbulnya pembiayaan *murabahah* bermasalah pada bank syariah. Di antaranya dengan frekuensi terbesar yaitu: sikap dan perilaku nasabah, bencana alam, krisis ekonomi, ketidakmampuan nasabah memenuhi AMDAL, manajemen keuangan. Disamping ketiga ini, banyak Permasalahan eksternal lain dengan frekuensi yang lebih rendah juga menjadi penyebab hadirnya pembiayaan *murabahah* bermasalah.

Tabel 4.4
Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah

NO	Penyelesaian	Frekuensi	Presentase	Rangking
1.	<i>Rescheduling</i>	7	17,5%	1
2.	<i>Restructuring</i>	7	17,5%	1
3.	<i>Reconditioning</i>	6	15%	2
4.	Eksekusi jaminan	6	15%	2
5.	<i>Write off</i>	3	7,5%	3
6.	Melalui BAMI	2	5%	4
7.	Litigasi	2	5%	4
8.	Penagihan	2	5%	4
9.	Somasi	2	5%	4
10.	On the spot	1	2,5%	5
11.	Penetapan denda	1	2,5%	5
12.	Pembentukan tim remedial	1	2,5%	5
Jumlah		40	100%	

Sumber : Data olahan peneliti (2020)

Berdasarkan Tabel 4.4 ada berbagai strategi yang dapat ditempuh dalam rangka penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah tiga di antaranya dengan frekuensi terbesar yaitu: *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, eksekusi jaminan dan *write off*.

D. Pembahasan

1. Penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah pada bank syariah

Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan untuk menelusuri Permasalahan-Permasalahan penyebab terjadinya pembayaran *murabahah* bermasalah, ditemukan berbagai macam penyebab dimana terdapat 38 Permasalahan internal dan 29 Permasalahan eksternal. Dari rekapitulasi data

tersebut peneliti kemudian melakukan perengkingan untuk menspesifikan pembahasan pada 3 besar masing-masing Permasalahan sebagai bahan utama pembahasan.

a) Permasalahan internal

Pertama, kualitas pejabat atau dapat diproksikan sebagai kualitas sumber daya manusia menjadi Permasalahan internal paling dominan penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah. Hal ini dikarenakan kurangnya kompetensi, ketelitian, pelatihan dan edukasi yang dilakukan oleh pihak bank terhadap *account officernya* untuk dapat membaca dan memprediksi setiap kemungkinan yang bisa terjadi. Hal ini berimbas dengan mudahnya lembaga keuangan mengalami pembiayaan bermasalah pada masa yang akan datang. Merujuk pada fenomena tersebut perlu ada upaya minimalisasi risiko oleh bank syariah dengan terus meningkatkan keahlian, kompetensi dan hal-hal lain yang berdasar pada edukasi yang memadai demi mencegah timbulnya risiko yang berpotensi menghadirkan pembiayaan *murabahah* bermasalah. Hal ini relevan dengan apa yang disampaikan oleh pak Farild selaku mantan praktisi Bank Panin Dubai Syariah;

“Dalam mengucurkan pembiayaan tentunya pihak bank akan terus mengupayakan serta meningkatkan kualitas serta mengedepankan konsep kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah agar bisa lebih meminimalisir terjadinya risiko-risiko pembiayaan.” (Wawancara dilakukan pada Agustus 2020 via daring)

Merujuk pada hasil wawancara tersebut kita dapat mengetahui bahwa pihak bank terus mengupayakan agar pembiayaan *murabahah* bermasalah

dapat lebih diminimalisir sebab jika banyak kasus pembiayaan bermasalah pada suatu bank tentunya hal tersebut akan berdampak buruk. Maka dalam mengukur dan mewujudkan hal ini, bank syariah pada umumnya melakukan perbaikan kualitas sumber daya manusianya. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan risiko yang diprediksi muncul diharapkan dapat dilakukan secara maksimal guna menekan potensi kerugian bank syariah.

Kedua, terkait dengan pengawasan atau pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen bank syariah. Pengawasan menjadi fungsi yang sangat penting dalam suatu organisasi karena akan mengontrol terarah atau tidaknya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, begitupun dalam bank syariah. Dalam operasionalnya bank syariah pasti memiliki SOP yang menjadi acuan atau pedoman dalam melakukan operasionalnya tidak terkecuali ketika ingin memberikan suatu produk pembiayaan murabahah pada nasabah. Ada banyak pertimbangan yang harus diperhatikan, termasuk analisis kebijakan dan Permasalahan-Permasalahan statistik lain yang dapat dijadikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan oleh karena itu penting bagi bank syariah untuk membuat sistem pengawasan yang efektif dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten dan memiliki profesionalisme tinggi guna menjamin siklus hidup bank syariah kedepannya.

Ketiga, terkait dengan penentuan kebijakan. Permasalahan ketiga ini secara vertikal terintegrasi langsung dengan Permasalahan pertama dan

kedua sumber daya manusia yang tidak kompeten, ditambah dengan sistem pengawasan internal yang lemah dan diujalankan oleh orang-orang yang tidak tepat akan menghasilkan kebijakan yang sifatnya rancu atau memiliki potensi besar menghadirkan kerugian bagi bank syariah. Kebijakan-kebijakan yang tidak tepat nantinya akan memberikan berbagai macam persoalan yang mengakibatkan turunya daya operasi bank syariah dan berbagai masalah lain yang sifatnya kompleks. Solusi terbaik untuk menghadirkan kebijakan yang tepat adalah dengan melakukan rekrutmen atau seleksi sumber daya manusia yang ketat dan perbaikan kualitas sistem kinerja di dalam bank syariah secara masif dan komprehensif.

b) Permasalahan Eksternal

Selain Permasalahan internal ada juga Permasalahan-Permasalahan dari luar atau disebut Permasalahan eksternal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah. Permasalahan-Permasalahan ini merupakan Permasalahan yang muncul dari luar sisi bank syariah itu sendiri.

Pertama, terkait dengan sikap dan perilaku nasabah. Nasabah sebagai objek penerima produk pembiayaan adalah Permasalahan eksternal utama penentu sukses atau tidaknya suatu pembiayaan *murabahah*. Nasabah dengan sikap dan perilaku yang baik tentunya akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kelangsungan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Sikap dan perilaku nasabah ini dapat diproksikan kedalam beragam bentuk, seperti komitmen pembayaran, kondisi *going concern*

usaha nasabah, analisis ekonomi nasabah dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban mereka selaku objek pengguna pembiayaan *murabahah*. Masih banyak proksi lain yang tidak dapat disebutkan peneliti satu persatu. Pada realitanya, banyak nasabah dengan tingkat sikap dan perilaku yang rendah, tetapi tetap saja bersikeras untuk diberikan atau difasilitasi pembiayaan *murabahah* oleh bank syariah. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai polemik, seperti ketidakmampuan membayar nisbah bagi hasil atau ketidakmampuan memenuhi atau menjalankan berbagai syarat yang telah disepakati bersama saat dilakukan kontrak pembinaan. Fenomena ini, sejatinya dapat diminimalisir dengan melakukan seleksi ketat bagi para nasabah yang mengajukan diri untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah*. Hal ini relevan dengan apa yang disampaikan oleh pak Farild selaku mantan praktisi bank Panin Dubai Syariah;

“Permasalahan-Permasalahan yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah jika dilihat dari jumlah nasabah yang macet pembiayaan *murabahahnya* memang murni karena penurunan dari usaha jika dilihat dari kuantitas, namun jika dilihat dari segi *plafond* pinjaman yang dilakukan pembiayaan tergantung berapa besar pinjaman yaaa masih tetap sama walaupun juga ada yang memang yang karakter dek memang dek karena memang hal paling susah untuk dianalisa dari seorang nasabah yaitu karakter, karakter itu sangat susah mau itu ustadz atau orang yang hitam dahinya tetap jugaji macet karena karakter itu susah dibaca. Tapi jika dibandingkan dengan karakter dengan penurunan dari kualitas usaha yaaa memang penurunun kualitas usaha yang menyebabkan pembiayaan nasabah macet.” (Wawancara dilakukan pada Agustus 2020 via daring).

Pernyataan di atas selaras dengan yang disampaikan oleh seorang informan Pak Tanar sebagai *branch manager* bank syariah:

“penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dek ini ada beberapa Permasalahan tapi yang paling mempengaruhi dek yaitu kemampuan membayarnya menurun/omset usaha dari nasabah mengalami penurunan.” (Wawancara dilakukan pada Agustus 2020 via daring).

Dari pernyataan informan di atas diketahui bahwa Permasalahan-Permasalahan yang melatarbelakangi timbulnya pembiayaan *murabahah* bermasalah ada 2: pertama yaitu penurunan usaha yang di miliki oleh nasabah tentunya hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaanya dan Permasalahan yang kedua ialah karakter yang dimiliki dari nasabah tentunya hal tersebut akan berpengaruh sebab apabila nasabah tidak memiliki kesadaran serta tanggungjawab atas pembiayaan yang diambilnya tentunya hal tersebut akan beresiko menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah sebab nasabah tidak memiliki kesadaran bahwa ia harus melunasi pembiayaan yang ia ambil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank.

Kedua, bencana alam merupakan Permasalahan eksternal yang tidak bisa diprediksi karena sifatnya yang tiba-tiba. Tidak adapun satu pihak yang bisa memprediksi terjadinya suatu bencana, termasuk pihak bank syariah dan nasabah itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada solusi pasti selain pemaklumkan dan restrukturisasi kontrak yang dapat dilakukan guna mengantisipasi Permasalahan eksternal yang satu ini.

Ketiga, krisis ekonomi. Krisis ekonomi merupakan suatu kondisi di mana perekonomian sedang berada pada fase yang tidak seimbang atau

tidak sejalan dengan target yang telah ditetapkan pemerintah maupun oleh individu dan juga badan. Kondisi ini merupakan kondisi yang lazim yang sering kita jumpai seperti adanya inflasi, deflasi, embargo ekonomi, dan situasi-situasi krisis ekonomi lainnya yang skalanya bisa berkisar pada area regional sampai ke area universal.

2. Metode Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Bank Syariah

Restructuring merupakan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara memperpanjang atau menambah periode jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang masih harus dibayarkan kepada bank syariah, di mana dalam hal ini peneliti menemukan 7 data dari 40 sampel penyelesaian pembiayaan bermasalah. *Restructuring* ini dilakukan dengan menambah periode jatuh tempo untuk memberikan keringanan kepada nasabah, lalu melakukan pembagian sisa kewajiban ulang untuk mengetahui berapa jumlah angsuran yang harus dibayarkan dengan periode jatuh tempo yang baru. Selanjutnya, yaitu *rescheduling* dimana penyelesaian ini dilakukan dengan pengubahan syarat pembiayaan terkait jadwal pembayaran tiap bulanya atau jangka waktu pembayaran. Untuk *rescheduling* ini peneliti menemukan 7 data dari 40 sampel penelitian.

Reconditioning (penyesuaian kondisi) terhadap pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau keseluruhan syarat pembiayaan bermasalah yang tidak terbatas pada perubahan jadwal jatuh tempo

pembayaran, periode waktu pembiayaan, atau persyaratan lain sepanjang tidak terkait dengan perubahan maksimum saldo pembiayaan. Peneliti menemukan 6 data dari 40 sampel penelitian. Selanjutnya yaitu eksekusi jaminan yang dilakukan bilamana nasabah telah benar-benar tidak mampu untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap kontrak pembiayaan dan telah menyetujui secara tertulis untuk melakukan lelang atas apa yang telah dijaminkannya. Hal ini menjadi solusi final yang sifatnya relevan dengan fungsi jaminan yang menjadi bagian kontrak pembiayaan. Peneliti menemukan 6 data dari 40 sampel penelitian terkait dengan penyelesaian dengan metode ini. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah diperkuat oleh hasil wawancara dengan pihak Panin Dubai atas nama Ibu Merry mengatakan bahwa:

“apabila terdapat pembiayaan bermasalah maka pengambilan kebijakan tidak pernah dilakukan oleh cabang tetapi langsung ditangani oleh pusat, tapi jika kolektabilitasnya masih berada pada posisi 1 dan 2 masih ditangani di cabang. Namun kalo sudah masuk kolektabilitas 3 maka pihak pusat yang akan tangani langsung dan pihak yang menanganinya itu SAM (Spesialis Aset Manajemen)”.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Pak Farild salah seorang mantan karyawan panin dubai di bagian pembiayaan yang saat ini menjadi seorang akademisi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

“Dalam lima tahun terakhir di bank panin dubai syariah ada beberapa kasus pembiayaan *murabahah* bermasalah bahkan tiap setahun itu ada, tidak ada itu bank yang tidak ada pasti ada dan yang menyelesaikan itu bagian SAM (Spesialis Aset Manajemen). Adapun cara penyelesaiannya dek ada beberapa yaitu: langkah awal dengan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara *rescheduling* dan *restructuring* kalau masih berada pada tahap awal yaitu kolektabilitas 1 dan 2, kalau sudah masuk kolektabilitas 3 akunya dilempar ke kantor pusat dan langkah terakhir dengan lelang agunan nasabah”.

Hal di atas senada dengan yang disampaikan oleh seorang informan Pak Tanar sebagai *Branch Collection* di bank syariah sebagai berikut:

“Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah itu dek tergantung kondisinya nasabah menunggak/bermasalah. Kalau nasabah bermasalah akrena kemampuan bayarnya menurun/omset usahanya menurun maka kita tawari restruktur dan rescheduling dengan mengangsur sesuai kemampuan nasabah saat ini tanpa merubah jangka waktu dan tidak menambah piutang, nah kalau sudah tidak ada kemampuan bayar sama sekali kita arahkan jual aset secara sukarela dan kalau sudah diarahkan jual aset sukarela tapi tidak mau baru kita eksekusi hak tanggungan (lelang).” (Wawancara dilakukan pada Agustus 2020 via daring).

Ketiga *write off* atau dikenal dengan penghapus bukuan yang dilakukan oleh pihak bank syariah kepada nasabah dengan potensi penyelesaian kewajiban yang sangat kecil atau kepada nasabah yang telah benar-benar dijastifikasi tidak bisa menyelesaikan kewajibanya dalam berbagai model penyelesaian. Penyelesaian model ini bias any dilakukan kepada nasabah yang mengalami kebangkrutan, nasabaha yang terganjal kasus hukum dan harus mendekam dipenjara, atau nasabah yang telah meninggal dunia. Peneliti menemukan 3 data dari 40 sampel penelitian terkait penyekeasian dengan *write off* ini.

Berbagai model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan respon atas pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank Syariah. Model-model penyelesaian tersebut dilakukan apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban kontrak sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dengan

persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam teori *Shariah Enterprise Theory* berisi tiga hal pokok yaitu: pertanggungjawaban secara vertikal kepada Allah Swt., pertanggungjawaban kepada manusia dan pertanggungjawaban kepada institusi atau lembaga. Hal tersebut yang akan menjadi landasan bagi kedua belah pihak agar senantiasa menjalankan kewajibannya tanpa terkecuali dalam proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan baik pihak nasabah maupun pihak bank.

3. Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Dalam upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada bank syariah terdapat beberapa Fatwa yang dapat dijadikan rujukan:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang konversi akad *murabahah*. Dalam fatwa tersebut dijelaskan beberapa metode yang dapat dilakukan lembaga keuangan syariah dalam rangka menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan ketentuan bahwa lembaga keuangan syariah boleh melakukan konversi akad yaitu dengan cara membuat akad baru bagi nasabah tidak mampu menyelesaikan atau melunasi pembiayaan *murabahah* yang diambil sesuai dengan jumlah serta waktu yang telah

disepakati antara pihak bank dan nasabah. Langkah tersebut dapat diambil apabila nasabah dianggap masih prospektif dengan ketentuan:

a. Apabila nasabah tidak mampu menyelesaikan atau membayar kewajibanya maka akad *murabahah* dihentikan dengan cara:

- i. Obyek yang menjadi jaminan oleh nasabah dijual kepada lembaga keuangan syariah dengan harga pasar
- ii. Dari hasil penjualan nasabah melunasi sisa hutangnya kepada lembaga keuangan syariah apabila hasil dari penjualan.
- iii. Apabila hasil penjualan melebihih sisa utang nasabah maka kelebihan tersebut dapat dijadikan sebagai uang muka untuk konversi akad.
- iv. Apabila hasil dari penjualan ternyata kurang dari dari jumlah pembiayaan maka sisa hutang wajib dibayar oleh nasabah dengan melakukan pelunasan sesuai dengan kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak bank.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah boleh mengambil langkah *rescheduling* atau penjadwalan kembali tagihan *murabahah* apabila nasabah tidak mampu menyelesaikan atau melunasi kewajibanya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Namun dalam proses tersebut bank harus mengikuti beberapa ketentuan yaitu: tidak menambah jumlah tagihan nasabah yang masih tersisa, adapun

penambahan beban biaya dalam proses ini murni karena biaya riil, adapun jika terjadi perpanjangan waktu pembayaran harus atas kesepakatan antara nasabah dan pihak bank.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan tagihan *Murabahah* dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan yang harus dijalankan apabila model penyelesaian ini dilakukan di mana bank syariah diperbolehkan memberikan potongan dari jumlah kewajiban nasabah dalam transaksi pembiayaan *Murabahah* bagi nasabah yang telah membayarkan angsuran dengan tepat waktu tetapi nasabah mengalami kesulitan sebab usaha yang ia jalankan mengalami penurunan dalam pemberian potongan tagihan *murabahah* tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa dalam proses penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bah yang sudah tidak mampu membayar kewajibanya sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak memiliki beberapa ketentuan yaitu: *pertama*, objek *murabahah* atau agunan yang dijual oleh nasabah kepada atau melalui lembaga keuangan syariah dengan harga pasar yang telah disepakati. *Kedua*, kemudian nasabah melunasi utangnya kepada bank syariah dengan menggunakan dana hasil penjualan. *Ketiga*, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa

utang tetap menjadi utang nasabah. *Keempat*, apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka lembaga keuangan syariah dapat membebaskanya

5. Analisis Kesesuaian Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* bermasalah di Bank Syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Berkaitan dengan *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, lelang jaminan, dan *write off* dari hasil wawancara dan juga menjadi top ranking dalam pemetaan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa model penyelesaian ini telah sejalan dengan berbagai fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Farild seorang akademisi dan mantan praktisi mengatakan bahwa:

“Sebenarnya dalam model penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah Majelis Ulama Indonesia tidak mengatur secara teknis mengenai model penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah tapi tentu kita saat melakukan penagihan harus santun, simpati dan dengan cara kekeluargaan intinya berkaitan dengan agama tidak menggunakan *debt collector*. kalau berbicara apa bank syariah merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia pastinya karena di situlah bedanya bank syariah dengan bank konvensional contoh kalau menagih, bank syariah jika nasabahnya sudah menunggak sebulan itu ada tatacaranya pertama kita surati dulu secara baik, kalau tidak ada itikad baik kita datang lagi itupun untuk mencari solusi pertama intinya kekeluargaan dulu dan tidak ada hal-hal yang langsung sita itu adalah langkah terakhir kalau sudah buntu dan nasabah sudah tidak ada itikad baik maka kita akan sita agunan.” (Wawancara dilakukan pada Agustus 2020 via daring).

Pemaparan di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Tanar selaku

Branch Collection di Bank Muamalat bahwa:

“Dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah harus merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Sebab jika tidak mengikuti aturan bisa saja kita yang akan dituntut balik.”

Pemaparan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam *Shariah Enterprise Theory* yang memuat tiga hal pokok yaitu: pertanggung jawaban secara vertikal kepada Allah SWT, pertanggungjawaban kepada manusia dan pertanggungjawaban kepada institusi atau lembaga. Hal tersebut telah sejalan dengan yang dilakukan bank syariah di mana dalam proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah bank syariah melakukannya dengan cara yang sesuai dengan kaidah dan syariat islam yaitu hubungan antar sesama manusia dalam hal ini nasabah dan debitur, hubungan manusia dengan lembaga dan hubungan manusia, lembaga dengan Tuhan selaku *stakeholder* tertinggi. Hal tersebut dilakukan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan mengenai model penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah telah sesuai dengan apa yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Sejalan dengan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan metode *rescheduling* dan *restructuring*. *Reschedulung* yaitu perubahan jadwal kembali pembayaran atau jangka waktu, di mana bank syariah merubah jadwal pembayaran tanpa menambah biaya apapun. Sedangkan *Restructuring* diberikan kepada

nasabah yang kesulitan dalam membayar angsuranya yaitu pokok dan bunga kredit namun masih memiliki prospek yang baik dan mampu membayar kewajiban setelah restrukturisasi dilakukan. Metode tersebut telah sejalan dengan fatwa dewan syariah yang berlaku.

- b. *Reconditioning* adalah perubahan seluruh atau sebagian persyaratan antara lain: perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak mengubah saldo pembiayaan atau piutang. Metode tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang konversi akad *murabahah* di dalam fatwa tersebut menjelaskan mengenai pemberian keringanan bagi nasabah yang kemampuan membayarnya menurun maka nasabah diberikan keringanan dalam bentuk konversi akad yaitu dengan pembuatan akad baru dalam penyelesaian pembayaran angsuran.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu bayar dijelaskan bahwa bank dapat melakukan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka obyek atau jaminan nasabah akan dieksekusi dengan harga sesuai kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.
- d. Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan cara *write off* tidak memiliki aturan yang khusus dalam fatwa, akan tetapi diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard dalam

fatwa tersebut dikatakan bahwa apabila nasabah tidak mampu mengembalikan sebagian atau keseluruhan kewajibanya pada bank sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka bank mengambil langkah *wite off* sebagian atau seluruh kewajiban nasabah. Namun penghapusbukuan di sini hanya sekedar penghapusan tagihan namun hutang nasabah tetap menjadi hutang dan tetap ditagih. Penghapusbukuan yang dilakukan oleh bank syariah tidak boleh di *publish* ke nasabah, hal tersebut di atur dalam Fatwa menurut peneliti tahapan tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard*.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah terbagi atas dua (2) yaitu Permasalahan internal di antaranya: kualiatas pejabat, pengawasan serta ketidaktepatan kebijakan. Adapun Permasalahan ekstrnal dengan frekuensi terbesar yaitu: sikap dan perilaku nasabah, bencana alam, krisis ekonomi, ketidakmampuan nasabah memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), manajemen keuangan.
2. Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah terdiri atas:
 - Fatwa DSN-MUI NO 48/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penjadwalan Kembali. Adapun metode penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dilakukan dengan cara *rescheduling*.
 - Fatwa DSN-MUI NO 46/DSN-MUI/II/2005/Tentang Potongan Murabahah. Adapun langkah yang diambil ialah lembaga keuangan syariah boleh memberikan potongan atas kewajiban nasabah.
 - Fatwa DSN-MUI NO 49/DSN-MUI/II/2005/Tentang Konversi Akad Murabahah, penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dilakukan dengan cara pembuata akad baru.
 - Fatwa DSN-MUI NO 47/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penyelesaian Piutang Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar, metode penyelesaian

pembiayaan *murabahah* bermasalah dilakukan dengan cara menjual agunan nasabah.

3. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya perihal penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh bank syariah maka dapat disimpulkan yaitu dalam rangka menyelesaikan pembiayaan bermasalah pihak bank melakukan berbagai cara. Terdapat tiga solusi yang ditempuh dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu: *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, eksekusi jaminan dan *write off*.

4. Adapun kesesuaian penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah sesuai dengan apa yang tertuang didalamnya yaitu :

- Fatwa DSN-MUI No 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* (terkait dengan penyelesaian dengan metode *rescheduling* dan *restructuring*).
- Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang konversi akad *murabahah* (terkait dengan *reconditioning*)
- Fatwa DSN-MUI 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu bayar (terkait dengan Eksekusi jaminan)
- No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard (tentang *wite off*).

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Dalam rangka menyelesaikan pembiayaan bermasalah pihak perbankan haruslah lebih jeli melihat permasalahan yang ada dan secepatnya mengambil langkah penanganan sebelum pembiayaan tersebut benar-benar bermasalah.
2. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah tentunya harus sesuai dengan apa yang tertera dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
3. Saya berharap agar peneliti berikutnya bisa lebih detail lagi dalam menganalisis penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah.



Daftar Pustaka

- Afiyanti, Y. 2008. Validitas dan Realibilitas dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2): 137-141.
- Almunawwaroh. M. 2017. Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*: 12 (2). 181-182.
- Ansar dkk. 2007. Tesis. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat (3-4).
- Antonio, S. M. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani).
- Asmara. J, Dahlan dan I Jauhari. 2015. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi*. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(3): 21-30.
- Bank Indonesia. 2002. *petunjuk pelaksanaan pembukaan kantor bank syariah, dalam daftar istilah*.
- Dharma.Y dan A. Pristianda, 2018. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (*Return On assets*) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Din Indonesia 2012-2016, *Jurnal Ekonomika Indonesia VII* (2): 61.
- Djazuli. A. *Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002)
- Effendi, J. U.,T. dan T. Nursyamsiah. 2017. Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) At Shariah Banking. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1): 109-138.
- Faturrahman D. M. A. 2014. *penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Fidyaningrum, A. Dan N. Jannah. 2016. Analisis Penyelesaian Masalah Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005. *Jurnal Cakrawala*, XI(2): 196-196.
- Fidyaningrum.A dan N. Jannah. 2016. Analisis Penyelesaian Masalah Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005. *Jurnal Cakrawala*, XI(2): 195-203.
- Hasan Muhammad Ali. *berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002).
- <http://www.alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya>, 27 Januari 2020.
- <https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html>. 27 Januari 2020.
- <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-2>. 26 Januari 2020

- Ibrahim, A dan A. Rahmawati. 2017 analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah; kajian pada produk murabahah di bank muamalat banda aceh. *iqtishadia jurnal kajian ekonomi dan hukum*, 10(1): 89.
- Ilyas. R. 2015. Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Penelitian*: 9(1): 184-186.
- Janni, M. A. 2018 Peranan Perbankan Sebagai Lembaga Penyalur Kredit Bagi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 10(88): 127-128.
- Lestari, N. M. dan Setiawati. 2018. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1): 75-99.
- Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar. 2017. *pembiayaan murabahah pada perbankan syariah perspektif hukum di indonesia, jurnal ekonomi syariah dan filantropi islam*: 1 (2). 214
- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UII Press, 2011).
- M.F Hidayatullah. 2014. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. *Jurnal Interest*, 12(1): 67-80.
- Margolang. R. F. 2018 “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Margolang. R. F. 2018. “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- MUI.or.id
- Nugraha, E. dan Setiawan. 2018. Non Performing Financing Factors In Syaria Commercial Banking In Indonesia. *International Journal of Commerce and Finance*, 4 (1): 27-39.
- Nurjanah. 2016. “*Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Purwokerto.
- Oktaviani. M. L. 2018. “*Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dengan fatwa dsn mui*”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.
- Popita M.F.A. 2013. Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(4): 404-412.

- Qomar. M. N. 2018. mudharabaah sebagai produk pemiayaan perbankan syariah perspektif abdullah saeed, *journal of islamic banking and finance*, 2 (2). 203-205.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Bitul Maal Wa Tamwil*. Edisi revisi Yogyakarta: Uii Press.
- Rohmah. A. F. 2018. Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Bank Syariah. *Jurnal Pranata I* (1): 43-55.
- Shobirin. 2016. Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (*BMT*). *Jurnal Iqtishadia*, 9(2): 398-420.
- Sholihin. A. 2015 “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang*”. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Sjahdeini. S. R *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).
- Solihatun. 2014. Analisis Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2007-2012. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1): 58-68.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta
- Supriyadi, A. 2003. Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia). *Jurnal Al-Mawarid Edisi X* (2-54).
- Syauqoti. R dan Ghozali. M. 2018. Aplikasi Akad *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3 (1): 4-5.
- Triuwono. I. 2019. So What Is Shariah Accounting?. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 42-50.
- Turmudi. M. 2016. Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, I(1): 97-98.
- Umam. K dan S. B. Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembanganya di Indonesia*, Edd. 1, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Press, 2017).
- Wangawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Zulfikri. A, A. Sobari. S dan S. Gustiawati. 2019. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Bank BNI Syariah Cabang Bogor. *Journal of Islamic Economis and Banking*, I (1): 65-78.

L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN 1

BIODATA

Identitas Diri

- Nama : Juliana Idris
- Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 20 Juli 1998
- Alamat : Bontorannu, Kec. Bungoro, Kab.
Pangkep
- E-mail : julianaidris07@gmail.com
- No. Hp : 085340060587
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

- 2005-2010 : SD Negeri 21 Bontorannu
- 2010-2013 : SMP Negeri 3 Bungoro
- 2013-2016 : SMA Negeri 1 Bungoro
- 2016-2020 : UIN Alauddin Makassar

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, Agustus 2020

Juliana Idris

LAMPIRAN 2

SURAT-SURAT





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1688 TAHUN 2020**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif **Jullana Idris** : NIM: 90500116032
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **PERBANKAN SYARIAH** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- | | |
|------------------------------------|--|
| Ketua | : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak. |
| Sekretaris | : Ismawati, S.E., M.Si. |
| Penguji Dirasah Islamiyah | : Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag. |
| Penguji Manajemen Keuangan Syariah | : Sumartin, SE., M.Ak. |
| Penguji Perbankan Syariah | : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. |
| Pelaksana | : Kurniati Syukur, S.Ag. |
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 18 Agustus 2020

Dekan
Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 1961130 199303 1 003

- Tembusan:
1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
 2. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Alauddin Makassar di Makassar
 3. Arsip

PEMRAKARSA (SITTI RIFQAH WIRANTI)	KASUBAG AKADEMIK (NURMIAH MUTI, S.IP,MM)



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1739 TAHUN 2020**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n. Juliana Idris, NIM : 90500116032
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Juliana Idris, NIM: 90500116032** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI, No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI, No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **PERBANKAN SYARIAH** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua** : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Amiruddin K, M.EI.
Pembimbing : Ismawati, SE., M.Si.
Pembimbing II : Dr. Ilham Gani, SE., MM.
Penguji I : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Penguji II : Sumarlin, SE., M.Ak.
Pelaksana : Kurniati Syukur, S.Ag.
1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa;
2. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 24 Agustus 2020
Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

Tembusan :
1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Arsip

PEMRAKARS (Fakhrunnisa, SE)	KASUBAG AKADEMIK (Nurmiah Muin, S.IP.,M.M)
	



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : TAHUN 2020
1780
TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : Juliana Idris
NIM : 90500116032
Tanggal : 27 Agustus 2020
Mahasiswa Jurusan : PERBANKAN SYARIAH
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "Metode Penyelesaian Pem
layaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah: Tinjauan Fatwa Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/
Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk
panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin
menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN
Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin
Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang
menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang
Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Sekertaris : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.
Penguji I : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Penguji II : Sumartini, SE., M.Ak.
Pembimbing I : Ismawati, SE., M.Si.
Pembimbing II : Dr. Ilham Gani, SE., MM.
Pelaksana : Kurniati Syukur, S.Ag.
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang
namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat
keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh
rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 28 Agustus 2020



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIM 1780130 199303 1 003

PEMRAKARSA (FAKHRUNNISA)	KASUBAG AKADEMIK (NURMAH MUIN, S.JP.,MM)

METODE PENEYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA:
TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS
ULAMA INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

20%	20%	12%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	4%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	www.slideshare.net Internet Source	1%
5	media.neliti.com Internet Source	1%
6	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%
7	es.scribd.com Internet Source	1%
8	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%

9	www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
10	tanyajawabfikh.com Internet Source	1%
11	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
12	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%

7	es.scribd.com Internet Source	1%
8	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
9	www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
10	tanyajawabfikh.com Internet Source	1%
11	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
12	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
13	jurnal.umt.ac.id Internet Source	1%
14	al-badar.net Internet Source	1%
15	journal.iai-agussalimmetro.ac.id Internet Source	1%
16	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
17	dspace.uir.ac.id Internet Source	1%
18	ejournal.iainkendari.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

Off

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Juliana Idris, lahir di Makassar pada tanggal 20 Juli 1998.

Penulis merupakan anak ke-3 dari 5 orang bersaudara anak dari pasangan Muh. Idris dan Hafsa. Penulis memulai pendidikan pada Tahun 2004 hingga Tahun 2010 di SDN 21

Bontorannu. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Tahun 2010 hingga 2013 di SMPN 3 Bungoro, lalu melanjutkan pendidikan pada Tahun 2014 hingga Tahun 2016 di SMAN 1 Bungoro. Dan pada Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Kota Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah dan penulis menyelesaikan studi S1 pada Tahun 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R